

ANALISIS PERAN PEMERINTAH, KEPALA SEKOLAH DAN GURU DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PAI DI ERA KURIKULUM MERDEKA

Mochamad Hariyadi ¹, Ubaidillah Fadli achmad²,
Agus Moh.Sholahuddin³

^{1,2,3} Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, bojonegoro, Indonesia

¹ Yadi190197@gmail.com, ² fadlize312@gmail.com, ³ agus@ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the roles of the government, school principals, and teachers in developing the Islamic Religious Education (PAI) curriculum in the Merdeka Curriculum era. The Merdeka Curriculum provides flexibility to educational units in developing student-centered learning, so its success requires synergy among educational stakeholders. This study uses a qualitative approach with a library research method. Data were obtained from books, scientific journals, and relevant official documents, then analyzed using descriptive-qualitative techniques through the process of collecting, grouping, and drawing conclusions. The results show that the government plays a role as a policymaker and provider of regulations, school principals as leaders and managers of the curriculum at the educational unit level, and teachers as the main implementers of learning. However, synergy between these three parties has not been optimal due to obstacles such as limited understanding of the Merdeka Curriculum, lack of coordination, and limited educational resources. The novelty of this study lies in the analysis of collaborative synergy among stakeholders in the development of the PAI curriculum, which not only highlights the roles of each party but also the interdependence between them. This study concludes that strengthening collaboration, improving competency, and supporting implementable policies are important factors in realizing effective Islamic Religious Education curriculum development in the Independent Curriculum era.

Keywords: *Islamic Religious Education (PAI) curriculum, Independent Curriculum, education stakeholders*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintah, kepala sekolah, dan guru dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di era Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dalam mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga keberhasilannya memerlukan sinergi antar stakeholder pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research). Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif melalui proses pengumpulan, pengelompokan, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan dan penyedia regulasi, kepala sekolah sebagai pemimpin dan pengelola kurikulum di tingkat satuan pendidikan, serta guru sebagai pelaksana utama pembelajaran. Namun, sinergi antar ketiga pihak tersebut belum berjalan optimal karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan pemahaman terhadap Kurikulum Merdeka, kurangnya koordinasi, dan

terbatasnya sumber daya pendidikan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis sinergi kolaboratif antar stakeholder dalam pengembangan kurikulum PAI, yang tidak hanya menyoroti peran masing-masing pihak, tetapi juga hubungan interdependensi di antara mereka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kolaborasi, peningkatan kompetensi, dan dukungan kebijakan yang implementatif menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengembangan kurikulum PAI yang efektif di era Kurikulum Merdeka.

Kata kunci: Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI), Kurikulum Merdeka, Stakeholder Pendidikan.

A. Pendahuluan

Kurikulum merupakan komponen fundamental dalam sistem pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Dalam Pendidikan Agama Islam (PAI), kurikulum memiliki peran strategis dalam membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum PAI harus dilakukan secara berkelanjutan agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia ditandai dengan penerapan Kurikulum Merdeka sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar. Kurikulum

ini memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dalam mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan sekolah. Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*), penguatan kompetensi esensial, serta pembentukan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila. Dalam konteks PAI, kebijakan ini membuka peluang bagi guru untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih kreatif, kontekstual, dan berorientasi pada internalisasi nilai-nilai keislaman.

Secara teoretis, keberhasilan implementasi kurikulum sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) pendidikan. Menurut teori manajemen pendidikan, pengembangan kurikulum merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah sebagai

pembuat kebijakan, kepala sekolah sebagai pemimpin dan pengelola pendidikan, serta guru sebagai pelaksana utama proses pembelajaran. Ketiga unsur tersebut harus bekerja secara sinergis agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka masih menghadapi sejumlah tantangan. Penelitian yang dilakukan oleh Bond et al. (2020) dan Bozkurt dan Sharma (2020) menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pendidikan membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, terutama guru, agar mampu beradaptasi dengan paradigma pembelajaran baru. Penelitian lain juga menemukan bahwa keberhasilan implementasi kurikulum sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola perubahan, menyediakan dukungan profesional, serta membangun budaya kolaboratif di lingkungan sekolah. Selain itu, dukungan pemerintah melalui regulasi, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kurikulum.

Meskipun demikian, berbagai fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka, khususnya dalam pengembangan kurikulum PAI, masih menghadapi berbagai kendala. Sebagian guru belum memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan implementasi Kurikulum Merdeka. Keterbatasan sumber daya pendidikan, kurangnya pelatihan yang berkelanjutan, serta belum optimalnya koordinasi antara pemerintah, kepala sekolah, dan guru juga menjadi hambatan dalam pengembangan kurikulum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dengan praktik implementasi di lapangan.

Berdasarkan hasil telaah penelitian terdahulu, sebagian besar kajian lebih banyak berfokus pada implementasi Kurikulum Merdeka dari perspektif guru atau kesiapan sekolah secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji sinergi antara pemerintah, kepala sekolah, dan guru dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam masih relatif terbatas. Padahal, keberhasilan pengembangan kurikulum PAI tidak hanya ditentukan oleh kompetensi

guru, tetapi juga oleh dukungan kebijakan pemerintah dan kepemimpinan kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Dengan demikian, terdapat celah penelitian (research gap) yang perlu dikaji lebih lanjut mengenai bentuk peran dan sinergi antarstakeholder dalam pengembangan kurikulum PAI di era Kurikulum Merdeka.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis peran pemerintah, kepala sekolah, dan guru dalam pengembangan kurikulum PAI di era Kurikulum Merdeka. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam pengembangan kurikulum PAI, mengkaji peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum PAI, menganalisis peran guru dalam pelaksanaan dan pengembangan pembelajaran PAI, serta mengidentifikasi bentuk sinergi antara pemerintah, kepala sekolah, dan guru dalam mendukung keberhasilan pengembangan kurikulum PAI pada era Kurikulum Merdeka.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian pendidikan

Islam, khususnya dalam bidang pengembangan kurikulum PAI. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan, menjadi acuan bagi kepala sekolah dalam mengelola dan mengembangkan kurikulum, serta menjadi referensi bagi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PAI yang sesuai dengan karakteristik dan tuntutan Kurikulum Merdeka.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*) untuk mengkaji peran pemerintah, kepala sekolah, dan guru dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di era Kurikulum Merdeka. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, peraturan pemerintah, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum PAI dan Kurikulum Merdeka.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan kajian literatur dengan cara

mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, serta menelaah berbagai sumber yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, pengelompokan berdasarkan tema, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan dan mengkaji berbagai referensi yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Adapun prosedur penelitian meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Peran Pemerintah dalam Pengembangan Kurikulum PAI di Era Kurikulum Merdeka

Pemerintah memiliki peran strategis sebagai penentu arah kebijakan pendidikan nasional, termasuk dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI). Dalam konteks Kurikulum Merdeka, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi

juga sebagai fasilitator yang memberikan ruang fleksibilitas kepada satuan pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menetapkan kebijakan Kurikulum Merdeka yang menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik serta penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila.

Selain itu, pemerintah juga berperan dalam menyusun standar nasional pendidikan, menyediakan perangkat ajar, serta memberikan pelatihan dan pendampingan kepada guru. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala, seperti ketimpangan pemahaman guru terhadap kurikulum baru serta keterbatasan akses terhadap pelatihan yang merata. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah dirancang dengan baik, pelaksanaan di lapangan masih memerlukan penguatan, khususnya dalam hal sosialisasi dan pendampingan.

B. Peran Kepala Sekolah dalam Pengembangan Kurikulum PAI

Kepala sekolah memiliki peran penting sebagai pemimpin pendidikan

di tingkat satuan pendidikan yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan kurikulum. Dalam Kurikulum Merdeka, kepala sekolah dituntut untuk mampu menjadi manajer sekaligus inovator dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif.

Peran kepala sekolah mencakup pengorganisasian kurikulum, pembinaan guru, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran. Kepala sekolah juga berperan dalam mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan kondisi sekolah. Menurut Oemar Hamalik, keberhasilan implementasi kurikulum sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajerial kepala sekolah dalam mengelola sumber daya pendidikan.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat tantangan, seperti keterbatasan kemampuan kepemimpinan kurikulum serta kurangnya inovasi dalam pengembangan program pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi kepala sekolah agar mampu mengoptimalkan perannya dalam pengembangan kurikulum PAI.

C. Peran Guru dalam Pengembangan Kurikulum PAI

Guru merupakan ujung tombak dalam implementasi kurikulum karena berinteraksi langsung dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam Kurikulum Merdeka, guru diberikan kebebasan untuk mengembangkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Peran guru dalam pengembangan kurikulum PAI meliputi penyusunan modul ajar, pengembangan strategi pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar. Guru juga berperan dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ke dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Menurut Muhaimin, guru PAI tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing moral dan spiritual peserta didik.

Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi guru antara lain adalah kurangnya pemahaman terhadap konsep Kurikulum Merdeka, keterbatasan kemampuan dalam mengembangkan pembelajaran berbasis proyek, serta beban administrasi yang masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya

peningkatan kompetensi profesional guru agar mampu menjalankan perannya secara optimal.

D. Analisis Sinergi Pemerintah, Kepala Sekolah, dan Guru

Keberhasilan pengembangan kurikulum PAI di era Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, kepala sekolah, dan guru. Ketiga pihak ini memiliki peran yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, kepala sekolah sebagai pengelola, dan guru sebagai pelaksana harus bekerja secara kolaboratif.

Dalam praktiknya, sinergi tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan pemerintah dengan implementasi di lapangan. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar stakeholder menjadi salah satu faktor penghambat utama. Selain itu, perbedaan pemahaman terhadap konsep Kurikulum Merdeka juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kurikulum.

Namun demikian, Kurikulum Merdeka sebenarnya memberikan

peluang besar untuk meningkatkan kolaborasi antar stakeholder. Dengan adanya fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum, sekolah dapat lebih leluasa dalam menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sinergi melalui peningkatan komunikasi, pelatihan berkelanjutan, serta dukungan kebijakan yang lebih implementatif.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di era Kurikulum Merdeka melibatkan peran penting dari pemerintah, kepala sekolah, dan guru sebagai stakeholder utama dalam pendidikan. Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan dan penyedia regulasi yang menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum, kepala sekolah berperan sebagai manajer dan pemimpin yang mengelola serta mengembangkan kurikulum di tingkat satuan pendidikan, sedangkan guru berperan sebagai pelaksana utama yang mengimplementasikan kurikulum dalam proses pembelajaran.

Ketiga peran tersebut pada dasarnya saling melengkapi dan menentukan keberhasilan implementasi kurikulum. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti belum optimalnya pemahaman terhadap Kurikulum Merdeka, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, serta kurangnya koordinasi antar stakeholder. Hal ini menyebabkan sinergi antara pemerintah, kepala sekolah, dan guru dalam pengembangan kurikulum PAI belum berjalan secara maksimal.

Dengan demikian, keberhasilan pengembangan kurikulum PAI di era Kurikulum Merdeka tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang baik, tetapi juga oleh kemampuan dan kerja sama antar stakeholder dalam mengimplementasikan kurikulum secara efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Dewey, J. (1938). *Experience and education*. Macmillan.
- Hamalik, O. (2017). *Kurikulum dan pembelajaran*. Bumi Aksara.
- Majid, A. (2014). *Pembelajaran pendidikan agama Islam*. PT Remaja Rosdakarya.

- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Rev. ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2015). *Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam*. PT RajaGrafindo Persada.
- Nasution, S. (2016). *Asas-asas kurikulum*. Bumi Aksara.
- Nasution, S. (2017). *Metode research (Penelitian ilmiah)*. Bumi Aksara.
- Sanjaya, W. (2018). *Kurikulum dan pembelajaran: Teori dan praktik pengembangan KTSP*. Kencana.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Artikel :

- Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020, March 27). *The difference between emergency remote teaching and online learning*. EDUCAUSE Review.
<https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Panduan implementasi Kurikulum Merdeka*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Merdeka belajar: Konsep dan implementasi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Jurnal :

- Bond, M., Bedenlier, S., Marín, V. I., & Handel, M. (2020). *Emergency*

remote teaching in higher education: Mapping the first global online semester. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 17(44), 1–24.
<https://doi.org/10.1186/s41239-020-00282-x>

Bozkurt, Aras & Sharma, Ramesh. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to CoronaVirus pandemic. 15. i-vi. 10.5281/zenodo.3778083.

Darling-Hammond, L., Flook, L., Cook-Harvey, C., Barron, B., & Osher, D. (2020). Implications for educational practice of the science of learning and development. *Applied Developmental Science*, 24(2), 97–140.
<https://doi.org/10.1080/10888691.2018.1537791>

Fullan, M. (2020). Learning and the pandemic: What's next? *Prospects*, 49(1–2), 25–28.
<https://doi.org/10.1007/s11125-020-09502-0>